

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2019





BADAN POM

KINERJA **BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2019

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kami hadirkan Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 yang dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan program dari pemerintah, dan melaporkan hasil dari Pengawasan Obat dan Makanan sepanjang tahun 2019.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM dan berbagai kemitraan dengan pemangku kepentingan yang mencakup standarisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (pencegahan).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, beberapa kasus penting terkait pengawasan Obat dan Makanan baik pada *pre-market* dan *post-market* telah direspon dan diungkap oleh BPOM serta mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kemajuan peradaban dan kehidupan masyarakat, maka pengawasan Obat dan Makanan perlu diperkuat. Untuk itu, langkah-langkah strategis terus dilakukan BPOM untuk terus bertransformasi menuju “BPOM baru” yaitu BPOM yang terus meningkatkan pelayanan publik dengan kecepatan dan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan, sesuai dengan moto pelayanan BPOM 5S yaitu Sambut dengan Senyum dan Salam yang didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2019. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM dan masyarakat. Buku ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Standardisasi.....	13
III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM	20
V. Perkuatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan	24
VI. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	25
VII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)	26
VIII. Kerjasama Internasional	27
IX. Pengelolaan Anggaran	30
X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM.....	30
PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2019.....	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019.....	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019.....	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019	7
Gambar 6.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019	7
Gambar 7.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019	8
Gambar 9.	Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan III tahun 2019.....	9
Gambar 10.	Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan.....	10
Gambar 11.	Total Posts by Network sampai dengan TW III 2019	16
Gambar 12.	Total Audience by Network Sampai dengan TW III 2019	16
Gambar 13.	Total Engagement s.d TW III 2019.....	17



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2019

Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Semarang / Kamis (04/07/2019)



Semarang, 4 Juli 2019. Badan POM kembali menemukan miliaran kosmetik ilegal. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil aktivitas penimbunan penjualan online yang diedarkan melalui media sosial, menggunakan ekspedisi, dan menyimpan barang di gudang tersembunyi.

Temuan kosmetik ilegal kali ini masih didominasi produk perawatan kulit sebagai pencerah/pemutih antara lain RDL Hidroquinone Tretinoin Babyface, Original DR Pemutih Dokter, Deonard Whitening & Spot Removing, Temulawak Cream Night Cream, dan RDL Papaya Whitening Soap.

Mengantisipasi peredaran produk ilegal secara online ini, Badan POM terus meningkatkan kerja sama lintas sektor tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan perusahaan jasa ekspedisi dan market place. Badan POM mengimbau pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produknya. Badan POM juga senantiasa mengedukasi masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan cek KLIK.

Badan POM dan 60 Negara Anggota Codex Godog Peraturan Terkait Cemaran Pangan

Jakarta / Senin (22/07/2019)

Jakarta, 22 Juli 2019. Memperingati 3 tahun Kepemimpinan Penny K. Lukito di Badan POM, diadakan acara "Dialog Kinerja 3 Tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tema "Badan POM Hadir, Kerja Bersama untuk Bangsa.

Acara ini dihadiri berbagai lintas sektor seperti perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Asosiasi Pengusaha di bidang Obat dan Makanan, Perguruan Tinggi dan rekan-rekan media.

Badan POM telah menunjukkan hasil kerja nyata dalam berbagai aspek pembangunan, sesuai pidato Presiden Jokowi tentang Visi Indonesia pada tanggal 14 Juli 2019 lalu. Badan POM melakukan reformasi yang dikategorikan dalam 5 sasaran target reformasi yaitu perkuatan kelembagaan dan regulasi, perkuatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, sarana dan prasarana (infrastruktur) pengawasan obat dan makanan, serta anggaran dan program strategis. Kelima sasaran target reformasi tersebut didokumentasikan dalam Buku Kinerja 3 Tahun Badan POM yang merupakan rangkuman dari kinerja Badan POM periode 20 Juli 2016 hingga 20 Juli



Raih Penghargaan APIP Level 3 Penuh, Badan POM Terapkan Fraud Control Plan (FPC) Bersama BPKP

Jakarta / Rabu (21/08/2019)

Jakarta, 21 Agustus 2019. Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis nasional di Indonesia, baik dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), maupun produk turunannya yang diperuntukkan industri kimia dan industri pangan.

Minyak sawit telah ditetapkan menjadi salah satu bahan pokok sebagai pembawa fortifikan, dalam hal ini vitamin A yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kurang gizi di tingkat nasional.

Beberapa tahun ke belakang, mulai muncul kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia, termasuk maraknya pencantuman palm oil free pada label produk makanan. Menanggapi permasalahan ini, Penny K. Lukito secara tegas menyampaikan Badan POM tidak menyetujui pendaftaran produk yang mencantumkan klaim "Bebas Minyak Sawit", dan aturan ini ditegaskan dengan tegas berdasarkan peraturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan kepada media usai mengadakan pertemuan terkait penanganan isu Palm Oil bersama Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Kemenko PMK, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), serta Gabungan Pengusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).



Bersama Lintas Sektor, Badan POM Wujudkan Obat dan Makanan Aman

Gansu / Senin (20/05/2019)

Gansu, 24 Agustus 2019. Kepala Badan POM Penny K. Lukito beserta jajaran menghadiri The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine Industry Expo 2019. Kehadiran Badan POM ini bertujuan untuk mendukung riset dan inovasi serta membangun jejaring riset dan produksi obat herbal berkualitas.

The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine Industry Expo merupakan sebuah forum atau pameran yang membahas tentang obat tradisional khususnya yang berasal dari Tiongkok. Penyelenggaraan Gansu TCM Expo didasari oleh semangat proyek One Belt One Road (OBOR), yang bertujuan membuka keran konektivitas dagang antar negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Partisipasi Badan POM secara tidak langsung guna memperkenalkan serta mempromosikan keunggulan dan kemanfaatan obat tradisional Indonesia kepada sekitar 500 perusahaan dan 3000 orang tamu undangan dari berbagai belahan dunia yang hadir dalam expo ini.



Bangun Kerjasama, Badan POM Kunjungi Daerah Perbatasan Vanimo, Papua Nugini



Jakarta / Minggu (07/09/2019)

Jakarta. Minggu (01/09) Badan POM mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki atensi lebih terhadap obat kedaluwarsa ataupun obat rusak dengan menginisiasi Gerakan "Ayo Buang Sampah Obat". Gerakan ini merupakan kelanjutan dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (Aknas POIPO) yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2017 silam. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan senantiasa menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa) agar terlindungi dari obat dan makanan yang tidak aman dikonsumsi.

Jaga Transparansi, BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2018

Jakarta / Rabu (18/09/2019)

Jakarta, 18 September 2019. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM, UPT Badan POM dalam hal ini Loka POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya tuntutan dan tanggung jawab sebagai satuan kerja (satker) mandiri serta kesiapan perangkat yang ada di Loka POM, menjadi latar belakang diselenggarakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kemandirian Loka POM yang dibuka langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.





BADAN POM

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2019

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

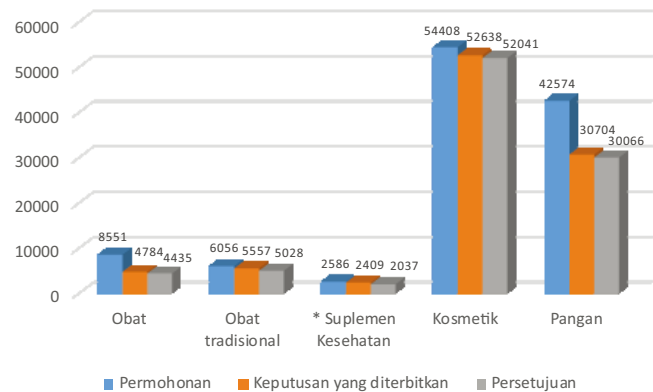
Pengawasan *pre-market*

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

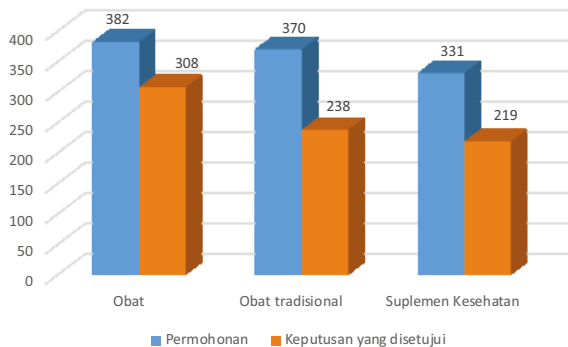


Sampai dengan Triwulan III tahun 2019, telah diterbitkan **96.092** keputusan dan **93.607** persetujuan izin edar dari **114.175** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2019



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan III Tahun 2019



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2019, dari 1.083 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 765 (70.64 %) iklan.**

Pengawasan post-market

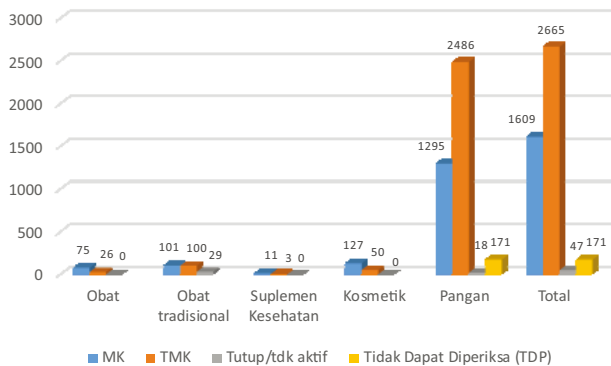
Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

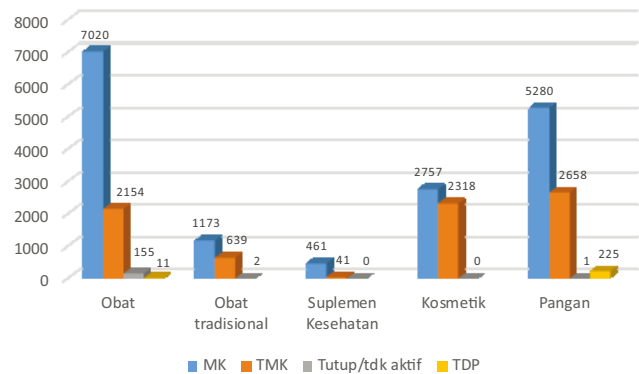
BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2019 telah diperiksa sebanyak **4.492 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **2.665 (59.33%)** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

Sampai dengan Triwulan III tahun 2019 telah diperiksa **24.670 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **7.810 (31.66 %)** sarana adalah TMK.



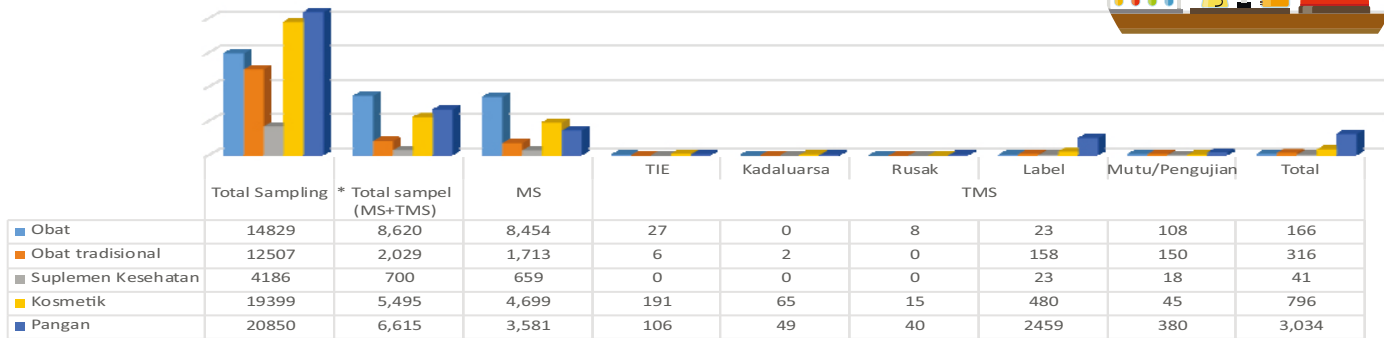
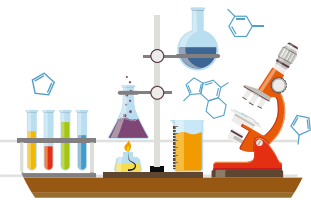
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan

TMK = Tidak Memenuhi Ketentuan



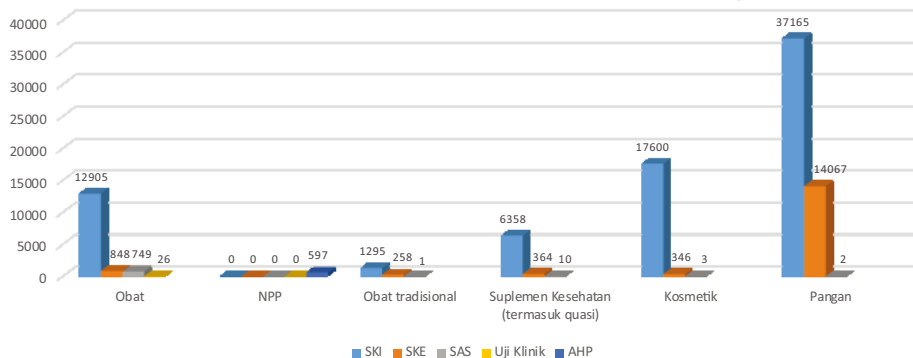


Keterangan:
 * Rotal Sampel yang selesai diperiksa dandiuj
 MS = Memenuhi Syarat
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
 TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

Sampai dengan Triwulan III tahun 2019, dari 71.771 sampel yang disampling terdapat 23.459 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dimana 19.106 (81.44%) sampel memenuhi syarat.

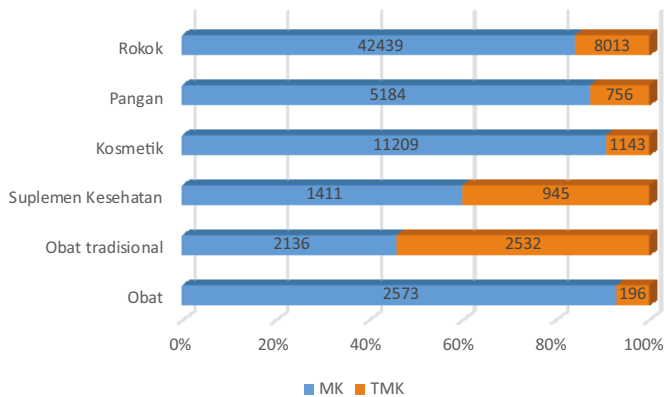
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2019 telah diterbitkan 75.323 SKI, 15.883 SKE, 765 SAS, 26 Uji Klinik, dan 597 AHP Obat dan Makanan.



Gambar 6. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

Pengawasan Iklan

4



Gambar 7. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan III tahun 2019, dari 78.537 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 64.952 (82.70%) iklan memenuhi ketentuan.



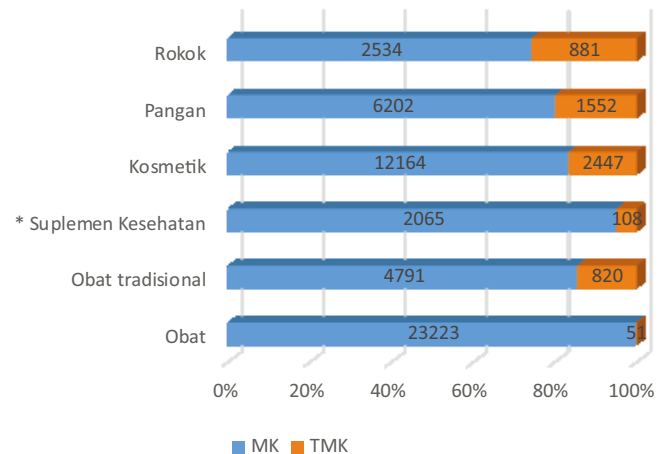
BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan III tahun

2019, dari 56.838 label Obat dan Makanan yang diawasi, 50.979 atau sekitar 89.69% label memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi

5

Pengawasan Label



Gambar 8. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan III tahun 2019

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia :

- ⊙ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- ⊙ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanlanjut	Persentase
Obat	4,776	3592	75.21
Obat Tradisional	206	202	98.06
Suplemen Kesehatan	26	25	96.15
Kosmetik	255	174	68.24

Gambar 9. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan III tahun 2019



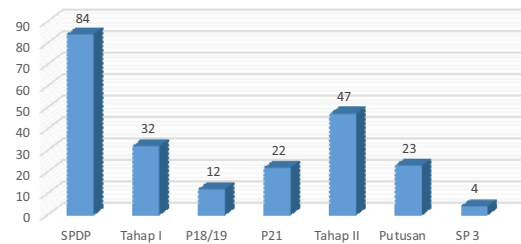


Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan Triwulan III pada tahun 2019, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 224 perkara. Dari 224 perkara tersebut, 84 perkara masih dalam tahap SPDP, 32 perkara

Perkembangan Perkara Penyidikan Seluruh Indonesia



Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan

Operasi Opson VIII



Operasi Opson merupakan operasi global di bawah koordinasi *International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL, Lyon*, Perancis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum maupun pihak berwenang yang terlibat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Dalam Operasi Opson VIII yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Pusat dan Daerah, Ditjen Bea & Cukai, serta Kementerian Pertanian serentak melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, dan penindakan sarana produksi dan distribusi pangan segar dan pangan olahan di seluruh Indonesia. BPOM menyita 1.606 item (826.929 pcs) pangan segar dan pangan olahan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dari 425 sarana yang diperiksa dengan nilai keekonomian 61 miliar rupiah. Temuan didominasi snack (biskuit, wafer, dll) yang sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Operasi Pemberantasan Kosmetik Ilegal

Di awal tahun 2019, BPOM berhasil menyita dan mengamankan kosmetik tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta Barat. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, menggerebek empat lokasi yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal termasuk palsu di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek.

Dari empat lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, kendaraan, dan dokumen dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah mengemas kembali sabun lokal yang memiliki izin edar BPOM menjadi seolah-olah produk impor dengan merek kosmetik terkenal dan memproduksi kosmetik palsu. Distribusinya tidak hanya di pulau Jawa, tetapi sampai ke kota-kota besar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi seperti Banjarmasin dan Makassar.

Dari hasil pengungkapan, diketahui bahwa tersangka yang berinisial DJ telah melakukan bisnis kosmetik ilegal di lokasi tersebut sejak awal 2018, diperkirakan omzet yang didapatkan mencapai 200 juta rupiah per bulan.

Jumlah yang kami temukan sebanyak 53 item terdiri dari 679.153 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 30 miliar rupiah.



Operasi Pemberantasan Pangan Kadaluwarsa

Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Kampung Bulak Kota Depok yang diduga mengganti tanggal kedaluwarsa terhadap pangan olahan. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 92 item terdiri dari 135.737 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 1,27M.

Operasi Pemberantasan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Berdasarkan hasil pendalaman informasi yang dilakukan oleh PPNS ditemukan sarana ilegal berupa gudang dan rumah di Komplek Inkopad Blok G7 No 10, Kel. Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal. Dari kedua lokasi tersebut, ditemukan sebanyak 14 item terdiri dari 230.968 pcs produk dengan nilai keekonomian mencapai 7,5M.

Dari kedua lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, alat komunikasi dan dokumen.

Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan ilegal, BPOM telah melaksanakan pemusnahan obat dan makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, pemusnahan dilakukan oleh beberapa Balai/ Balai Besar POM seluruh Indonesia sebagai berikut :

No	Balai Besar/Balai POM	Tanggal	Produk yang Dimusnahkan		
			Jumlah Item	Jumlah Pieces	Total Nilai (Rp)
1	Banda Aceh	20 Maret 2019	1.656	192.761	Rp1.263.303.200
2	Jakarta	26 April 2019	875	61.092	Rp13.000.000.000
Jumlah			2.531	253.853	Rp14.263.303.200

Pada tanggal 03 September 2019, telah dilaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap Rumah di Jl. Ratna No. 53 RT 004 RW 008, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng.

Dilakukan penindakan terhadap seluruh tempat penyimpanan seisi rumah dan ditemukan produk sediaan farmasi berupa Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebanyak 102 jenis item sejumlah 270.550 Pieces dengan nilai ekonomi taksiran barang bukti sebesar ± Rp 6.368.145.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kasus tersebut merupakan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 13 standar obat, dimana 8 (delapan) standar progresnya mencapai lebih dari 50% yaitu:

1. Standar Obat Non Kompendial mengakomodir Standar mutu obat zat aktif baru yang belum ada di Farmakope (94,29%)
2. Revisi Farmakope Indonesia (56,00%)
3. Revisi PerBPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Indonesia (100,00%)
4. Peraturan BPOM Pelaporan Kegiatan Produksi Industri Farmasi (70,00%)
5. Peraturan BPOM Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (66,67%)
6. Revisi Pedoman Teknis CDOB (70,00%)
7. Revisi Peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100,00%)
8. Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker (73,33%)



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 11 standar obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, dengan standar progres mencapai lebih dari 50% yaitu:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Penerapan CPOTB Secara Bertahap Bagi UMKM OT (80%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (80%)
3. Rancangan Pedoman Farmakodinamik Obat Bahan Alam (Pre Klinik) (80%)
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (100%)
5. Pedoman Penilaian Suplemen Kesehatan Yang Mengandung Probiotik (80%)
6. Peraturan BPOM tentang Pengawasan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (80%)
7. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Stabilitas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (80%)
8. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.42.06.10.4556 Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (90%)
9. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika (80%)
10. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B (80%)
11. Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003 (100%)

Telah disusun 26 kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yaitu:

1. Kajian Obat Tradisional mengandung Kafein (100%)
2. Kajian Bahan Tambahan Baru Laurocapram (100%)
3. Kajian Bahan Aktif Metil Nikotinat (100%)
4. Kajian Pencantuman Peringatan / Perhatian untuk Produk yang Mengandung Centella Asiatica p (100%)
5. Kajian mengenai Peringatan/Perhatian untuk Produk yang Mengandung Valeriana officinalis radix (100%)
6. Kajian Kandungan Tanaman Mengandung Kafein (100%)
7. Kajian Bahan Baku Aktif Arachis hypogea skin (100%)
8. Kajian Bahan Baku Aktif dari Antherea pernyi Geurin-Meneville (Pupa Ulat Sutra) (100%)
9. Kajian Permohonan Informasi tentang Kategori Produk Lancure dan Artimax (100%)
10. Kaji Ulang Persyaratan Batas Kadar Citrinin dalam Produk Obat Tradisional Berbasis Red Yeast Rice (Beras Angkak) (100%)
11. Kajian tentang Bahan Tambahan Baru (Dimethylether, Butana, Propana) untuk sediaan Aerosol Obat Tradisional (100%)
12. Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baru Polypodium leucotomos (PL) Extract dalam Produk Suplemen Kesehatan (100%)
13. Kajian tentang Penggunaan Istilah Nutrasetikal pada Produk Suplemen Kesehatan (100%)
14. Kajian Plasenta Rusa sebagai Bahan Suplemen Kesehatan (100%)
15. Kajian Produk Kombinasi Caffeine, L-Theanine, dan Taurine dalam Minuman Berenergi (100%)
16. Kajian Regulasi Produk Nutrisi Oral untuk Pasien Malnutrisi dengan Kondisi Gangguan Tertentu (100%)
17. Kajian Kombinasi Baru Hyaluronic Acid dan Boswellia serrata (100%)
18. Kajian Klaim Produk Suplemen Kesehatan yang Mengandung Membran Canggang Telur (100%)
19. Kajian Produk Suplemen Kesehatan Kombinasi Baru Mengandung Resveratrol dan Vitis venifera (semen) Extract (100%)
20. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Ulfa lactuca Sebagai Salah Satu Bahan Baku Suplemen Kesehatan (100%)
21. Kajian Tentang IFRA (100%)
22. Kajian tentang Halykoo (100%)
23. Kajian tentang Kosmetika Hotel (100%)
24. Kajian tentang Kosmetika Mainan (100%)
25. Kajian tentang Klinik dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Lain menjadi Sarana Kosmetik Golongan B (100%)
26. Kajian tentang Petrolatum (100%)



Pangan

Telah disusun 14 peraturan, standar, maupun pedoman pangan olahan, dengan standar progres mencapai 50% yaitu:

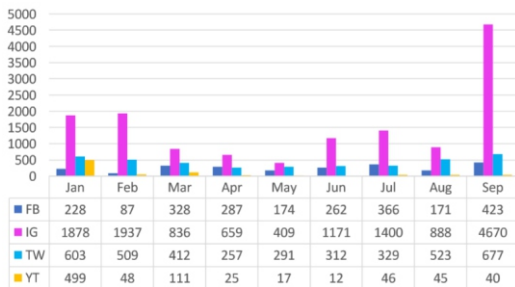
1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (70%)
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus (70%)
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas (70%)
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Produk PKGK (MP-ASI) (70%)
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang Diproduksi oleh UMK (Usaha Mikro dan Kecil) (70%)
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (78%)
7. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan (70%)
8. Pedoman Formaldehide Alami pada Pangan (78%)
9. Pedoman tentang Kemasan Daur Ulang (78%)
10. Pedoman Implementasi Peraturan Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan (78%)
11. Pedoman Penilaian Mutu Gizi dan Non Gizi Pangan (78%)
12. Pedoman Label Pangan Olahan (70%)
13. Pedoman Perhitungan Karakteristik Dasar Kategori Pangan Olahan (70%)
14. Spesifikasi & Penggunaan Bahan Dasar Permen Karet/Gum Base (78%)

III. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

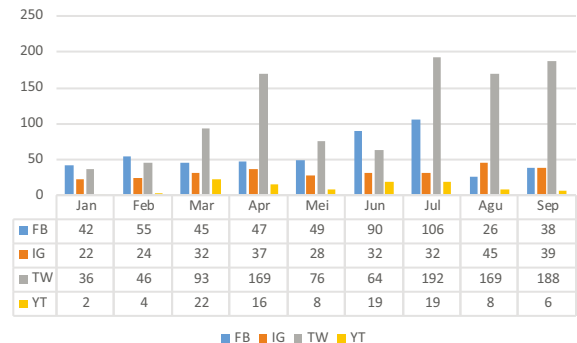
BPOM melakukan fungsi pengawasan tiga lapis, yaitu produsen, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat harus terus diedukasi dan diberi informasi yang benar tentang keamanan obat dan makanan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu.

BPOM melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk dengan memanfaatkan pers/media. BPOM telah menerbitkan 44 (empat puluh empat) siaran pers dan menerbitkan 7 (tujuh) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu obat dan makanan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial BPOM. Selain itu dilaksanakan juga 12 (dua belas) kali *talkshow* atas permintaan media televisi dan 43 kali wawancara pimpinan BPOM dengan media.

BPOM juga melakukan penyebaran informasi melalui media sosial melalui akun ofisial *Facebook Fanpage, Twitter, Instagram* dan *YouTube*. Hasilnya performa media sosial BPOM mampu menggerakkan jumlah followers secara positif.



Gambar 12. Total Audience by Network sampai dengan TW III 2019

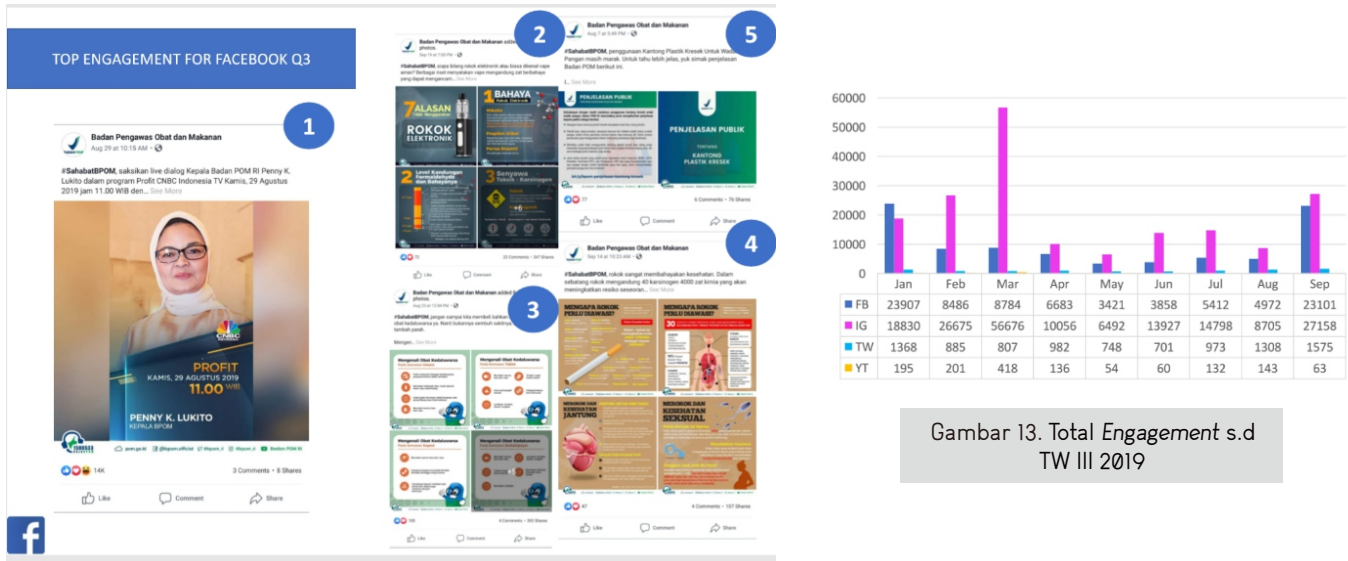


Gambar 11. Total Posts by Network sampai dengan TW III 2019

Pada triwulan III, Twitter memiliki aktifitas tertinggi sebanyak 549 tweets dibanding dengan dua triwulan sebelumnya dengan dominasi tertinggi berurutan di bulan Juli, September dan Agustus. Post tertinggi kedua adalah Facebook sebanyak 170 posts. Kemudian Instagram yang juga memiliki jumlah post tertinggi 116 posts dan Youtube dengan penayangan 43 video.

Sementara itu pertumbuhan *audience* pada triwulan III tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 9.578 *audience*. Sementara triwulan II tahun 2019 hanya 3.876 *audiences* dan triwulan I tahun 2019 sebanyak 7.476 *audiences*. Peningkatan signifikan terjadi pada Instagram 6.958 *audiences*, diikuti Twitter 1.529 *audiences*, Facebook 960 *audiences*, dan Youtube 131 *audiences*.

Aktivitas media sosial paling aktif dengan pertumbuhan *engagement* paling tinggi terjadi pada *platform* Instagram sebanyak 50.661 *engagement*, Facebook 33.485 *engagement*, Twitter 3.856 *engagement*, dan Youtube 338 *engagement*. Pertumbuhan *engagement* Instagram dan Facebook tertinggi di bulan September, disusul Juli dan Agustus. Sedangkan Twitter tertinggi pada September disusul Agustus dan Juli. Secara keseluruhan *engagement* tertinggi pada semua *platform* terjadi di bulan September, disusul Juli dan Agustus.



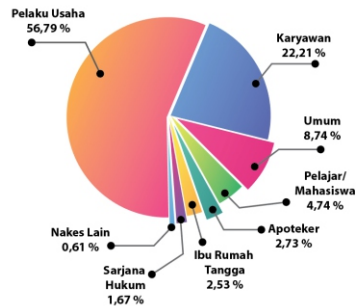
Gambar 13. Total Engagement s.d TW III 2019

Top Engagement Facebook kategori *most liked* dan *most engaged users* terdapat pada konten Flyer Dialog Kepala Badan POM dalam Program Profit CNBC Indonesia, kategori *most commented* pada konten Rokok Elektrik, kategori *most shared* pada konten Kenali Obat Kedaluwarsa.

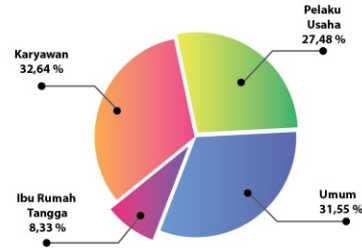


Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 14.901 (56,79%) layanan dan karyawan sebanyak 5827 (22,21%) layanan. Adapun layanan pengaduan sebagian besar dari karyawan sebanyak 329 (32,64%) layanan dan pelaku usaha sebanyak 277 (27,48%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN PROFESI

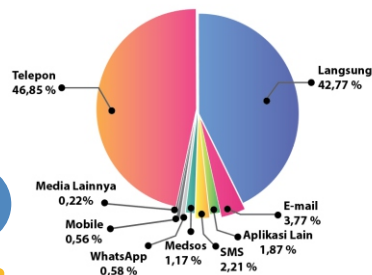


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN PROFESI

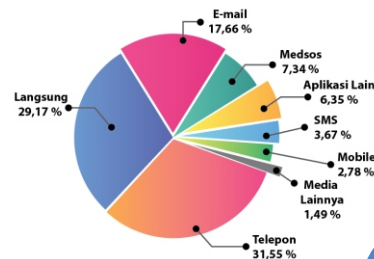


Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui telepon sebanyak 12.294 (46,85%) layanan dan datang langsung sebanyak 11.224 (42,77%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam penyampaian pengaduan yaitu telepon sebanyak 318 (31,55%) layanan dan datang langsung sebanyak 294 (29,17%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN MEDIA

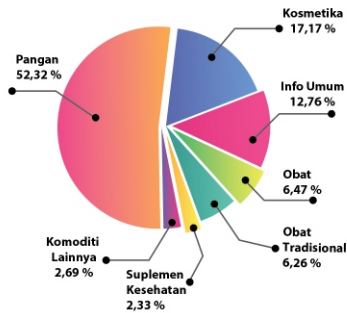


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN MEDIA

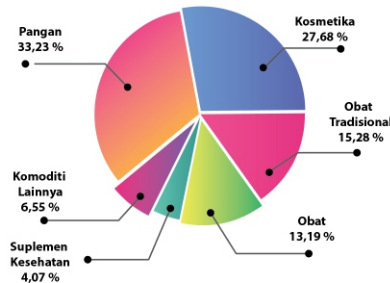


Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 13.729 (52,32%) layanan dan kosmetika sebanyak 4505 (17,17%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 335 (33,23%) layanan dan kosmetika sebanyak 279 (27,68%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

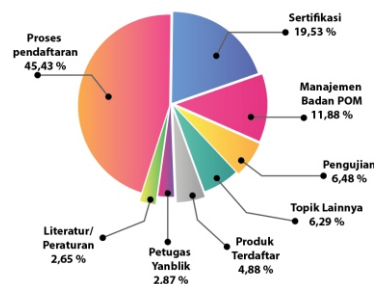


DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN KOMODITI

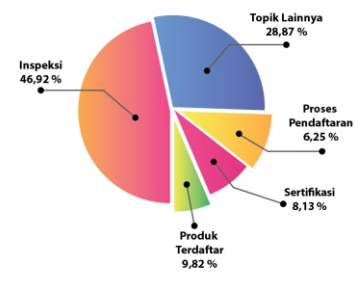


Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 11.920 (45,43%) layanan, proses sertifikasi sebanyak 5.124 (19,53%) dan manajemen BPOM sebanyak 3118 (11,88%) layanan. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan sebagian besar yaitu tentang inspeksi sebanyak 473 (46,92%) layanan.

DATA LAYANAN INFORMASI BERDASARKAN TOPIK



DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN TOPIK



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2019

Komunikasi, Informasi,
& Edukasi

KIE

Obat dan makanan

Triwulan 3 Tahun 2019

KIE Langsung
ke Komunitas

1

KIE di Sarana Ritel – Peluncuran Program Nasional "Ayo Cek KLIK, Sebelum Belanja", Lippo Mall Kemang, 7 Sep
KIE melalui Mobil HaloBPOM di Area CFD "Ayo Buang Sampah Obat", 1 Sep

Pameran

2

Pameran e-Kiosk dalam rangka Kinerja BPOM tahun 2016-2019, 22 Juli
RITECH Expo, Renon, Bali, 25-29 Agustus
Bandung Food and Health Expo 2019, ITB, 26-28 Agustus

KIE kunjungan
Mahasiswa/
Pelajar

3

Kunjungan Mahasiswa FF UNPAD, 6 Agustus
Mahasiswa Farmasi UI pada PSAF FFUI, Depok, 22 Agustus
Kunjungan Mahasiswa FF UI, 26 Agustus
Kunjungan Mahasiswa FF UI, 27 Agustus
Kunjungan Mahasiswa Pascasarjana IIK Strada Kediri, 29 Agustus

Siaran Pers/
Penjelasan/
Klarifikasi Berita

4

2 Kali terkait Isu Peredaran Produk Krupuk Kulit Babi yang Berlogo Halal dan Kantong Plastik Kresek

Wawancara/
talkshow media

5

3 kali talkshow atas permintaan media dan 5 kali wawancara pimpinan Badan POM dengan media

Advertorial/Video/
ILM di media
massa dan
elektronik

6

Penayangan materi audio di 4 jaringan Radio Prambors 102.2 FM Majalah Keuangan (Standar Pelayanan Registrasi Pangan Olahan) Reformasi Badan POM di Media Indonesia
Influencer: Ananda Omesh, Ussy Sulistiawati, dan Rio Febrina
Dorong Daya Saing Produk UMKM Nasional di Gatra 5 video di youtube dan media nasional online

ILM di Sorotan
Transportasi
Umum

7

Cover seat KA Tawang Jaya, kelas ekonomi premium (Pasar Senen-Semarang)

Pengelolaan
media sosial
PPID

8

Twitter @PPIDBadanPOM
Subsite ppid.pom.go.id

Jumlah Total Kegiatan :

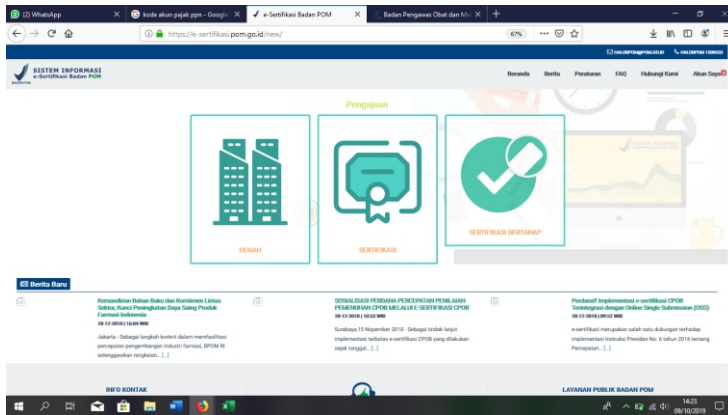
38



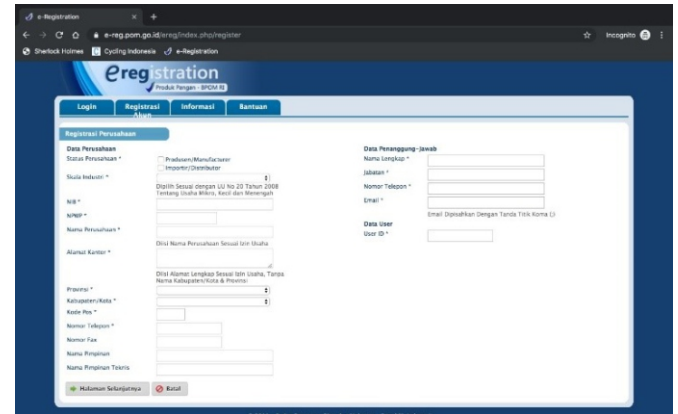
1500533
HALOBPM



IV. Pengembangan Aplikasi e-BPOM



Pengembangan Aplikasi E-Registarsi Pangan

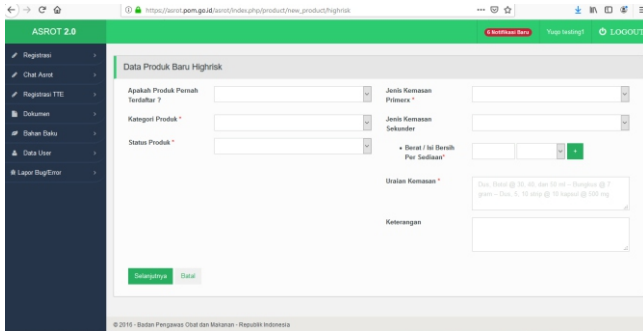


Pengembangan Aplikasi E-Registarsi Sertifikasi

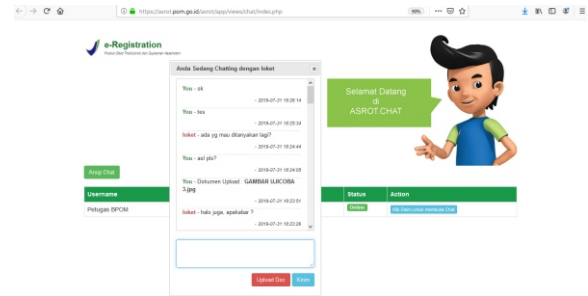


Aplikasi Halo BPOM Mobile sudah ada di playstore dan sudah dilakukan update pada menu Halo BPOM





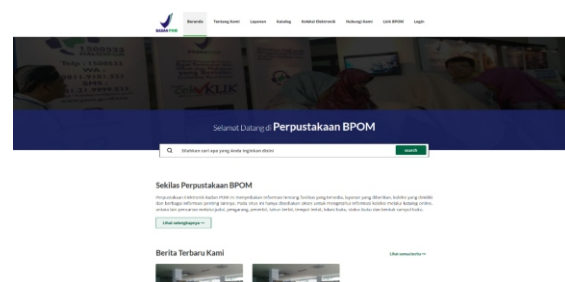
Fitur Pengajuan Registrasi Suplemen Kesehatan High Risk



Fitur Live Chat dengan Loker pada Aplikasi Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Capaian Implementasi 2D Barcode



Tampilan Subsite Perpustakaan BPOM setelah Pengembangan Aplikasi



Kegiatan Video Conference BPOM Pusat

V. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, telah ditetapkan 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Badan POM, 90 (sembilan puluh) Keputusan Kepala Badan POM, 123 (seratus dua puluh tiga) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

3 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

27 Judul Peraturan Badan POM

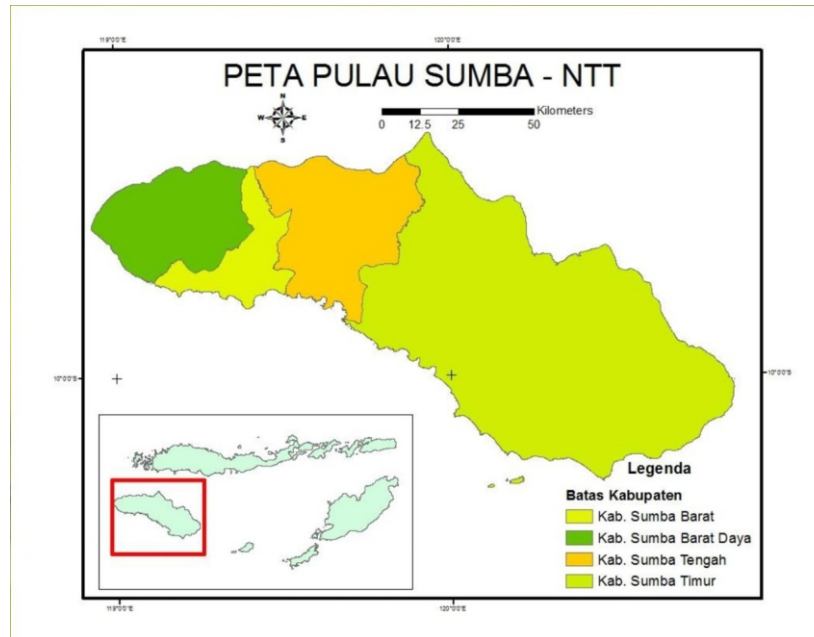


Peraturan Badan POM :

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BPOM
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPOM
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan BPOM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan BPOM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tentang Bahan Tambahan Pangan
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tentang Cemaran Dalam Kosmetika
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tentang Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tentang Kemasan Pangan
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Pangan Olahan
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 tentang Perubahan atas PerBPOM No 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
26. Peraturan Badan POM Nomor 26 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika
27. Peraturan Badan POM Nomor 27 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan POM

VI. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai 73 (tujuh puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, pada wilayah kerja UPT BPOM dapat dibentuk unit organisasi nonstruktural Pos Pengawas Obat dan Makanan (Pos POM).



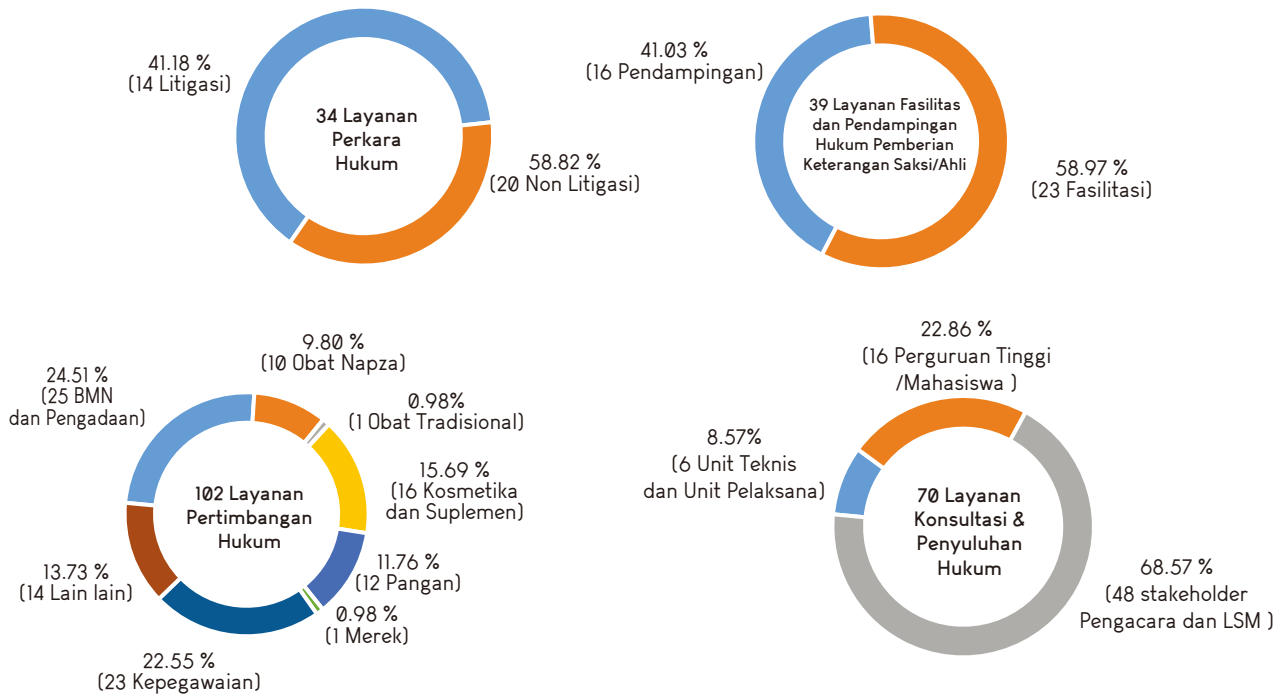
Sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi, diperlukan pembentukan Pos POM di Sumba Timur pada wilayah kerja UPT Balai POM di Kupang dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Pos POM di Sumba Timur mendapatkan rekomendasi tertulis dari Anggota Komisi IX DPR RI dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, ditetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.22.09.19.3521 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pos Pengawas Obat dan Makanan di Sumba Timur. Wilayah kerja Pos POM di Sumba Timur meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah.

VII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2019

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 245 layanan yang terdiri dari :



VIII. Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri BPOM tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Berikut kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan III 2019, diantaranya:

1. 25-26 Juli 2019: Sosialisasi Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara-Negara OKI di Bandung

Badan POM menggelar acara Sosialisasi Hasil Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara-Negara OKI di Aston Pasteur Bandung. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dibuka langsung oleh Kepala Badan POM RI. Melalui pertemuan ini, Badan POM mengajak seluruh pihak, yaitu para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk saling mendukung dan bahu-membahu melakukan langkah nyata dalam upaya implementasi hasil pertemuan OKI yang strategis, untuk meningkatkan peran strategis Indonesia dalam forum OKI, mendorong kerja sama antar negara anggota OKI melalui kerja sama teknis dan program perkuatan kapasitas serta meningkatkan akses pasar/ekspor obat dan vaksin ke negara anggota OKI.

Dalam rangkaian acara ini, Kepala Badan POM berkesempatan menyerahkan Laporan Lengkap Pertemuan Pertama OKI kepada tujuh perwakilan kementerian/lembaga diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet dan Bea Cukai. Selain itu juga diserahkan plakat apresiasi atas dukungan pertemuan OKI kepada Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan 22 Pelaku Usaha.

Hari kedua pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyusunan program/kegiatan dalam rangka **Implementasi Organization of Islamic Cooperation (OIC) Action Plan**, adalah kunjungan ke produsen vaksin PT. Biofarma. Seperti yang diketahui, Biofarma merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi Vaksin dan Antisera dan telah berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa, baik di Indonesia maupun mancanegara selama 126 tahun sejak pendiriannya. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Biofarma termasuk diantaranya negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau dikenal OIC. Produksi vaksin Biofarma sendiri telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM dan mendapatkan pra kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO).

Adapun rangkaian kegiatan kunjungan ke Biofarma ini antara lain penayangan video serta sesi pengenalan Biofarma, diskusi dan tanya jawab seputar program implementasi *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) *Action Plan* terkait vaksin, serta kunjungan ke *Museum Exhibition Hall* Biofarma, Fasilitas Riset OIC Center of Excellent, dan Fasilitas Produksi dan Pengemasan.

2. **26 – 29 Juli 2019: Misi Kepala Badan POM ke Jepang untuk menyampaikan pandangan dalam “The 27th Annual Meeting of the International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM2019)”**
Badan POM memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan produk herbal termasuk fitofarmaka, agar selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga agar produk herbal asli Indonesia seperti jamu dapat mendunia. Hal ini disampaikan Kepala Badan POM saat pidato pada The 27th Annual Meeting of International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) di Sapporo, Jepang.
Dukungan lintas sektor yang terlibat dalam Satgas ini penting, karena pengembangan produk herbal dari Hulu ke Hilir membutuhkan kerjasama K/L terkait (Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan lain lain).
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Badan POM telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Nasional (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka yang terdiri dari lintas sektor terkait dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembentukan Satgas ini merupakan salah satu upaya perwujudan kebijakan hilirisasi untuk mendukung akses dan ketersediaan obat Nasional dan pada saatnya akan berperan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Kehadiran Badan POM pada ICNIM 2019 merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan obat tradisional yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, dalam konsep Academia, Business, Government (ABG).
Kunjungan kerja Badan POM ke Jepang ini, selain untuk memenuhi undangan the 27th Annual Meeting ICNIM yang dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta perwakilan dari 25 negara di dunia, juga digunakan oleh Badan POM untuk memperluas jejaring internasional dalam membangun industri obat herbal di Indonesia yang digagas melalui Satgas Nasional Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, Fitofarmaka dan Obat Herbal. Antara lain pertemuan dengan Amino Research, produsen bahan baku berbasis riset terkemuka di Jepang, diskusi bertukar informasi dan pengalaman, serta peninjauan kerja sama riset dan alih teknologi dalam rangka mendorong pengembangan industri obat bahan alam dalam negeri yang berdaya saing.
3. **22 – 24 Agustus 2019 : Misi Kepala Badan POM ke China untuk menjadi pembicara kunci pada “The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine (TCM) Industry Expo”** Kehadiran Badan POM dalam *The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine Industry Expo 2019* bertujuan untuk mendukung riset dan inovasi serta membangun jejaring riset dan produksi obat herbal berkualitas.
Kepala Badan POM menjelaskan bahwa melalui *The 2nd China (Gansu) Traditional Chinese Medicine Industry Expo 2019*, Badan POM secara tidak langsung memanfaatkan proyek *One Belt One Road (OBOR)* untuk memperkenalkan serta mempromosikan keunggulan dan kemanfaatan obat tradisional Indonesia kepada sekitar 500 perusahaan dan 3000 orang tamu undangan dari berbagai belahan dunia yang hadir dalam expo ini.
Kepala Badan POM menekankan pentingnya menciptakan pendekatan inovatif untuk mempercepat pengembangan obat tradisional dari bahan alami sampai dengan pengembangan fitofarmaka, yaitu obat berbahan alam yang sudah lulus uji klinis.

Melalui expo ini, Badan POM dapat mempelajari kebijakan dan pengembangan industri obat tradisional Tiongkok untuk menjadi referensi bagaimana obat tradisional Indonesia dapat dikembangkan dengan kualitas yang memenuhi standar dan menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi daerah dan nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas utama Badan POM untuk dapat menaikkan nilai ekonomi Indonesia melalui pengembangan industri jamu nusantara. Tiga perusahaan Indonesia yaitu PT. Borobudur, PT. Leo Agung, dan PT. Harvest Gorontalo turut menyemarakkan expo ini dengan mempromosikan berbagai produk obat tradisional hasil produksinya.

4. 28 Agustus 2019 : MoU Badan POM dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia

Dalam rangka pembinaan pelaku usaha ritel modern, Badan POM dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) sepakat untuk bekerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU) tentang kerja sama di bidang Pengawasan dan Pembinaan dalam rangka Peredaran Obat dan Makanan di Ritel Modern. Acara penandatanganan merupakan rangkaian acara *Talkshow* eksistensi UMKM Pangan di Era Revolusi Industri 4.0. Diharapkan melalui MoU dan *talkshow* ini, dapat meningkatkan peran UMKM dalam menciptakan produk pangan yang aman bagi generasi yang berdaya saing yang pada akhirnya dapat menghasilkan SDM Indonesia yang maju dan unggul.

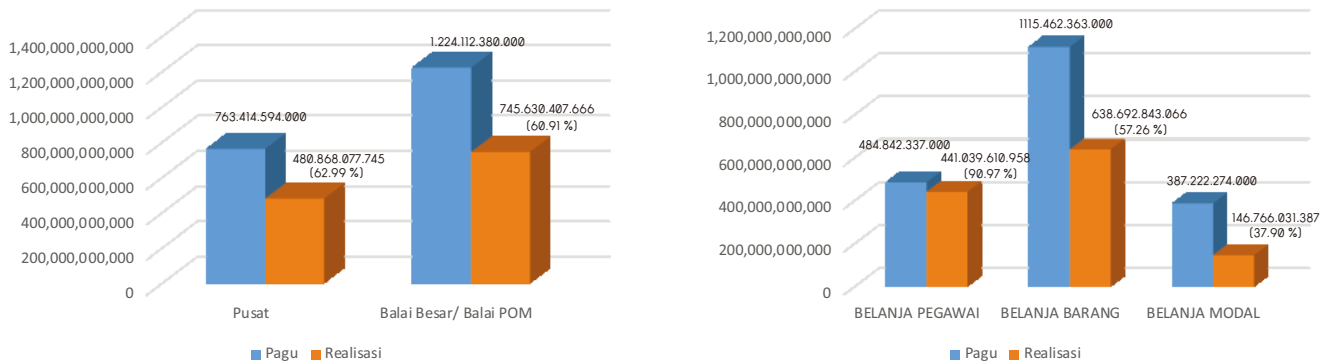
5. 2-3 September 2019 : Kegiatan Terpadu Region Barat dan Tengah

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan lintas sektor, khususnya di Kawasan perbatasan, dipandang perlu meningkatkan kapasitas pejabat Badan POM terkait komunikasi, negosiasi, dan diplomasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM menyelenggarakan workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi. Workshop diikuti oleh 62 peserta perwakilan Balai Besar/Balai POM, Loka POM dan unit Kerja Pusat. Pada hari pertama workshop, peserta diberikan materi paparan terkait menciptakan inovasi, tata cara pergaulan internasional (*table manner* dan *cocktail reception*), *public speaking*, teknik negosiasi dan teknik drafting suatu perjanjian Kerja sama internasional, kertass posisi (*statement*), dll. Pada hari kedua, peserta dilibatkan dalam *Multi-stage Negotiation Simulation (MSNS)*, berupa simulasi persidangan internasional, konferensi pers dan pertemuan bilateral. Selain acara tersebut, dilakukan juga sosialisasi monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri melalui *online*.

Diharapkan melalui workshop ini, pejabat Badan POM dapat meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait khususnya dengan pemerintah daerah, pengelola perbatasan, dan forum internasional lainnya.

IX. Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2019, BPOM mendapat anggaran sebesar Rp1.987.526.974.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2019 sebesar Rp1.226.498.485.41,- (61,71%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp480.868.077.745,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp745.630.407.666,-



X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2019. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III tahun 2019 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2015-2019 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	61	Indeks	-	-
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71	%	-	-
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	Dokumen	45	49,45
		Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	60	Indeks	-	-
		Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	Kerjasama	1	33,33
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80	%	-	-
		Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95	%	-	-
		Nilai AKIP Biro Kerjasama	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	72.4	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	nilai	WTP	100.00
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85.25	nilai	95.08	111.53
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100	%	66.39	66.39
		Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	92.00	92.00
		Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	80.00	80.00
		Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4.3	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,3	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100	%	0	0,00
		Ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	44,37	44,37
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	%	100	100,00
		Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan wartawan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	65	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Humas dan DSP	65	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hmas dan DSP	100	%	100	100,00
		Persentase KIE yang dilaksanakan terhadap target	100	%	67,69	67,69
		Rasio pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87	%	99,80	114,71
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon 1	65	Indeks	77,15	118,69
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93	%	96,12	103,35
		Persentase permintaan informasi dari media yang ditindaklanjuti	61	%	76,92	126,10
		Nilai AKIP Biro Humas dan DSP	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,45	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan layanan rumah tangga	2,9	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan layanan kepegawaian	2,9	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM	84	%	75,00	89,29
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85	%	90,66	106,66

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Persentase SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai perencanaan	72	%	35,71	49,60
		Nilai AKIP Biro Umum dan SDM	81,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
1.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi terhadap total SDM	75	%	80,81	107,75
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3,85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ketersediaan dokumen Pengembangan Kompetensi terhadap rencana induk Pengembangan Kompetensi	66	%	37,87	57,38
		Persentase SDM yang dinilai kompetensinya terhadap target SDM yang dinilai pada tahun berjalan	85	%	44,37	52,20
		Persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya terhadap total SDM BPOM	75	%	27,53	36,71
		Nilai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sesuai Kirk Patrick	3,88	Nilai	3,930	101,29
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	90	%	50,00	55,56
		Nilai Akreditasi Lembaga Diklat	C	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100	%	50,00	50,00
		Nilai SPBE	meningkat		2,44	2,44
		SLA Layanan TIK	meningkat		100,00	100,00
		Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60	%	13,00	21,67
		Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68	%	80,00	117,65
		Persentase sistem informasi yang sesuai standar	40	%	16,67	41,68
		Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100	%	75,00	75,00
		Sertifikat ISO 27001	1	Sertifikat	30,00	3000,00
		Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100	%	100,00	100,00
		Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100	%	20,00	20,00
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100	%	5,00	5,00
		Nilai performa website BPOM	75	%	69,00	92,00
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai	akhir tahun	akhir tahun
2.1	Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan Pengelolaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik	89	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan	90	%	50,43	56,03
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	Nilai RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	10	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,60	Nilai	7,63	88,72
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/ WBBM	12,00	Unit Kerja	20	166,67
3.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75	%	100	133,33
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	0	0,00
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	87		akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	12	52,17
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material (WTP)	100	%	100	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	78	%	88,62	113,62
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	87	%	97,95	112,59
		Nilai AKIP Inspektorat I	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5	Nilai	95,83	833,30
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	75	%	0	0,00
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75	%	100	133,33
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	Nilai	90,43	100,98
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75	%	0	0,00
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK=20; WBBM= 4	Unit Kerja	20	83,33
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92	%	0	0,00
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100	%	100	100,00
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85	%	99,42	116,96
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	70	%	93,07	132,96
		Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85		85	100,00
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan	13	56,52
		Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100	%	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai AKIP	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Level Kapabilitas APIP	level 3	Level	level 3	100,00
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	46,95	Rasio	34,49	73,46
		Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	50	%	akhir tahun	akhir tahun
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks POM	71	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94	%	96,38	102,53
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60	%	93,00	155,00
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80	%	98,54	123,18
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87	%	99,40	114,25

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	%	82,70	116,48
		Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	%	85,96	85,96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	41,8	%	29,99	71,75
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	49,8	%	48,69	97,77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	%	92,75	111,75
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM	46,95	Rasio	27,82	59,25
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	%	31,86	63,72

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100	%	0	0,00
		Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2	dokumen	0	0,00
		Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman dan sesuai prosedur	20	dokumen	11	55,00
		Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	3	kajian	Progres 40%	Progres 40%
		Persentase pelaku usaha/komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan	80	%	0	0,00
		Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur	12	dokumen	6	50,00
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase hasil intelijen Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	75	%	63,63	84,84
		Persentase laporan intelijen obat dan makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75	%	54,54	72,72

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.3	Intelijen Obat dan Makanan	Jumlah profil jaringan intelijen obat dan makanan	2	Profil	1	50,00
		Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti secara tepat	55	%	46,34	84,25
		Persentase kegiatan intelijen yang akurat	70	%	60	85,71
		Jumlah jejaring intelijen di bidang obat dan makanan	7	jumlah	3	42,86
		Jumlah basic descriptive intelligent di bidang obat dan makanan yang akurat	18	jumlah	8	44,44
		nilai AKIP Direktorat Intelijen	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah basic descriptive intelligent di bidang obat dan makanan yang akurat	18	jumlah	8	44,44
		nilai AKIP Direktorat Intelijen	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	23,5	%	48,80	207,66
		Persentase sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66	%	73,07	110,71
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	85	%	86,61	101,89
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	85	%	96,42	113,44

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	87	%	95,50	109,77
		Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan	61	%	52,05	85,33
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan OT dan SK yang dilaksanakan	61	Rasio	51,71	84,77
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan OT dan SK yang dilaksanakan	61	Rasio	51,71	84,77
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil	61	%	81,88	134,23

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	56	%	73,15	130,63
		Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	81,88	134,23
		Persentase laporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	83	%	97,59	117,58
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	81	%	akhir tahun	akhir tahun
4.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang memenuhi ketentuan	62	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi baru yang memenuhi syarat	87	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan teknologi Baru	79,17	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	70	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait pengawasan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	76,7	Rasio	5,88	7,67
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diberikan	80	Nilai	83,33	104,16
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang dilaksanakan	27	Rasio	47,76	176,89
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru yang diselesaikan tepat waktu	94	%	90,03	95,78
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil	92	%	45,38	49,33

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	62	%	73,33	118,27
		Persentase laporan efek samping kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	67	%	31,98	47,73
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	81		akhir tahun	akhir tahun
4.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase kesesuaian pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP oleh BB/BPOM dan Loka POM	65	%	73,53	113,12
		indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	75	%	97,96	130,61
		jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	Teknologi Informasi	1,00	100,00
		jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	600	pelaku usaha	478,00	79,67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	80	%	85,21	106,51
		Jumlah petugas BB/BPOM, Petugas Lintas Sektor, dan Pengelola Saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	600	petugas	293,00	48,83
		nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	Teknologi Informasi	1,00	100,00
		jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	600	pelaku usaha	478,00	79,67
		Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	80	%	85,21	106,51
		Jumlah petugas BB/BPOM, Petugas Lintas Sektor, dan Pengelola Saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	600	petugas	293,00	48,83
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang ditindaklanjuti	55	%	79,18	143,96
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	72	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor	55	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan industri rokok dalam ketentuan iklan dan label produk tembakau	55	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	99	%	98,89	99,89
		Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pembinaan terkait keamanan, mutu dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	87	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif yang dilaksanakan	55	%	39,45	71,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase tindak lanjut pengawasan mutu, label, iklan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	55	%	41,85	76,09
		Persentase laporan farmakovigilans yang ditindaklanjuti	75	%	75,04	100,05
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	75000	Iklan dan label	28416	37,89
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	35,55	74,06
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi ketentuan	48	%	65,60	136,67
		Persentase Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang memenuhi syarat	85	%	85,18	100,21
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	72	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Indeks kepatuhan sarana produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan sarana distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	55	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	Rasio	100,00	111,11
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik terkait produk Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	90	Rasio	100,00	111,11
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan produk/sampling Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang dilaksanakan	55	rasio	54,94	99,89
		Persentase keputusan hasil pengawasan pangan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan tepat waktu	94	%	91,61	97,46
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82	%	0,00	0,00
		Nilai AKIP Dit.PRRS	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	70	%	70,00	100,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat, NPP	85	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13	industri	2,00	15,38
		Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	60	%	51,11	85,18
		Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80	%	20,62	25,78
		Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	90	%	30,33	33,70
		Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	87	%	67,42	77,49
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	79	Indeks	83,96	106,28

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	76	%	95,63	125,83
		Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan	6	Dokumen	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0,9	Nilai	0,99	110,00
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Tingkat efektivitas pendampingan	87	%	88,80	102,07
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.12	Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diterbitkan tepat waktu terhadap obat yang diselesaikan	67	%	66,99	99,99
		Persentase keputusan evaluasi pengembangan obat yang diterbitkan tepat waktu	82	%	84,05	102,50
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	78	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya terhadap persyaratan registrasi pangan olahan	76	%	95,63	125,83
		Jumlah pedoman, standard, kriteria, dan prosedur registrasi pangan Olahan	6	Dokumen	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	0,9	Nilai	0,99	110,00
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00
		Tingkat efektivitas pendampingan	87	%	88,80	102,07
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.12	Registrasi Obat	Persentase keputusan registrasi obat yang diterbitkan tepat waktu terhadap obat yang diselesaikan	67	%	66,99	99,99
		Persentase keputusan evaluasi pengembangan obat yang diterbitkan tepat waktu	82	%	84,05	102,50
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	78	indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.12	Registrasi Obat	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan registrasi obat	25	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah usulan penyusunan/revisi pedoman, standar, kriteria dan prosedur registrasi Obat	3	dokumen	1,00	33,33
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi obat	68	Rasio	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah pelayanan konsultasi dan advokasi registrasi obat	120	layanan	85,00	70,83
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	71	%	75,03	105,68
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi Obat	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Keputusan Registrasi Obat Tradisional, yang diselesaikan tepat waktu	75	%	59,36	79,15
		Persentase Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu.	65	%	67,90	104,46
		Persentase keputusan Registrasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	%	66,37	80,94
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	75	indeks	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	75	indeks	0,00	0,00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	75	indeks	0,00	0,00
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Penilaian Uji Pra Klinik/ Klinik dan DIP	75	indeks	0,00	0,00
		Persentase kesesuaian dokumen registrasi OT, SK dan notifikasi Kosmetik terhadap persyaratan yang ditetapkan	88	%	93,55	106,31
		Jumlah dokumen identifikasi registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	7	Dokumen	5,00	71,43
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang registrasi Suplemen Kesehatan	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang notifikasi Kosmetik	69	Rasio	0,00	0,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang penilaian Uji PraKlinik / Klinik dan DIP	69	Rasio	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tingkat efektivitas pendampingan (indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pendampingan/ bimbingan/ pembinaan)	75	nilai	67,29	89,72
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	70,5	%	100,00	141,84
		Nilai AKIP Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dimanfaatkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentasi permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan Manfaat Obat Tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	75	%	92	122,67
		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan standar OT, SK dan Kosmetik	1	dokumen	1	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.14	Standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentasi sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	10	12,50
		Persentase standar OT, SK, dan Kosmetik yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	80	%	70	87,50
		Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.15	Standardisasi Pangan Olahan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	85	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80	%	97,25	121,56
		Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	14	standar	Progres 44,29%	Progres 44,29%
		Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.15	Standardisasi Pangan Olahan	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase Standar Obat dan NAPPZA yang dimanfaatkan	80	%	0	0,00
		Persentase Rancangan Standar Obat NAPPZA yang disampaikan untuk kebijakan	70	%	0	0,00
		Indeks kesesuaian standar Obat NAPPZA	80	indeks	0,26	0,33
		Indeks kesesuaian rancangan standar Obat NAPPZA	80	indeks	0,34	0,43
		Jumlah kebutuhan standar Obat NAPPZA	13	Kebutuhan standar	13	100,00
		Persen sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	81	%	39,22	48,42
		Persentase rancangan standar dan standar Obat NAPPZA yang sudah ditetapkan dibanding dengan yang direncanakan	80	%	10,50	13,13
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk Direktorat Standardisasi Obat NAPPZA	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,	22	Dokumen	16,00	72,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sesuai perencanaan	100	%	86,67	86,67
		Persentase pegawai yang mengimplementasikan manajemen kinerja di Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100	%	100,00	100,00
		Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan	75	%	10,19	13,59
		Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	61	indeks	0,00	0,00
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	61	indeks	0,00	0,00
		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	30	%	Progres 25%	Progres 25%
		Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	80	%	Progres 48%	Progres 48%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	2	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan	80	%	20	25,00
		Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase peningkatan kemampuan pengujian Laboratorium BPOM terhadap standar/peraturan yang ditetapkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar Good Laboratory Practices yang ditetapkan	85	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap standar	65	%	62,30	95,85
		Persentase pemenuhan Baku Pembanding sesuai kebutuhan	73	%	69,12	94,68
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar yang ditetapkan	72	%	41,27	57,32
		Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai Service Level Agreement	90	%	89,34	99,27
		Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus	100	%	83,16	83,16

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Nilai AKIP PPOMN	81	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Status akreditasi	1	sertifikat	0,00	0,00
4.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan	50	Indeks	0	0,00
		Persentase perkara obat dan makanan ilegal yang terungkap aktor Intelektualnya	50	%	30	60,00
		Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	0,7	Nilai	0	0,00
		persentase penyelesaian perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	65	%	42,85	65,92
		Nilai AKIP Direktorat Penyidikan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
4.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase hasil riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi	100	%	Progres 41,42%	Progres 21%
		Jumlah dokumen rencana induk riset dan kajian Obat dan Makanan	1	Dokumen	1	100,00
		Persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk	100	%	100	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
4.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan timeline	100	%	0	0,00
		Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholder	100	%	0	0,00
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2019
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 30 September 2019)

A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	359,611,361,000	242,543,717,169	67.45%
3158	BIRO KERJASAMA	7,525,900,000	5,116,128,902	67.98%
3159	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	28,279,300,000	15,886,057,882	56.18%
4110	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	12,429,149,000	7,231,018,045	58.18%
4111	BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29,000,000,000	15,424,162,651	53.19%
	BIRO UMUM DAN SDM	282,377,012,000	198,889,519,689	70.43%
3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	68,468,001,000	42,085,188,218	61.47%
4112	Pengelolaan SDM BPOM	213,909,011,000	156,804,331,471	73.30%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	51,836,895,000	32,856,954,376	63.39%
4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9,833,970,000	6,608,536,828	67.20%
4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11,025,670,000	6,257,237,685	56.75%
4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	10,254,400,000	6,861,570,546	66.91%
4127	DIT. REGISTRASI OBAT	10,810,000,000	6,533,272,179	60.44%
4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9,912,855,000	6,596,337,138	66.54%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	41,096,377,000	25,325,378,716	61.62%
4119	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12,366,155,000	8,474,389,495	68.53%
4121	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	11,240,866,000	6,537,539,175	58.16%
4128	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11,334,528,000	6,821,073,908	60.18%
4129	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6,154,828,000	3,492,376,138	56.74%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	58,870,422,000	34,610,635,983	58.79%
	4120 DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9,553,024,000	5,506,526,132	57.64%
	4124 DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAM RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14,922,142,000	8,222,250,408	55.10%
	4126 DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8,979,000,000	5,901,498,613	65.73%
	4130 DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	10,728,621,000	5,986,515,320	55.80%
	4132 DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14,687,635,000	8,993,845,510	61.23%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	41,432,389,000	17,276,546,361	41.70%
	4117 DIT. PENGAMANAN	22,033,980,000	5,762,290,123	26.15%
	4118 DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9,250,000,000	5,240,450,795	56.65%
	4134 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	10,148,409,000	6,273,805,443	61.82%
6	INSPEKTORAT UTAMA	22,124,859,000	16,235,911,437	73.38%
	4115 INSPEKTORAT I	15,433,969,000	11,210,386,770	72.63%
	4116 INSPEKTORAT II	6,690,890,000	5,025,524,667	75.11%
7	4133 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	64,960,728,000	36,574,754,109	56.30%
8	4135 PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	24,998,654,000	12,174,075,775	48.70%
9	4114 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58,019,297,000	36,298,929,990	62.56%
10	4113 PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	40,463,612,000	26,971,173,829	66.66%
TOTAL SATKER PUSAT		763,414,594,000	480,868,077,745	62.99%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	44,641,364,000	25,777,795,568	57.74%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	63,202,602,000	43,250,480,917	68.43%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	58,712,753,000	38,670,820,355	65.86%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	40,168,122,000	27,241,697,024	67.82%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	61,197,658,000	39,374,705,728	64.34%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	34,321,861,000	25,805,895,309	75.19%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	51,368,009,000	30,359,638,006	59.10%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	46,528,137,000	28,061,041,362	60.31%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	40,922,061,000	25,112,534,046	61.37%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	30,860,264,000	16,015,682,561	51.90%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	40,191,194,000	28,690,870,719	71.39%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	31,694,873,000	21,197,065,102	66.88%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	30,794,115,000	21,732,549,968	70.57%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	27,600,822,000	18,855,174,000	68.31%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	57,420,838,000	32,230,099,417	56.13%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	30,891,562,000	18,577,118,095	60.14%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	39,049,251,000	21,714,072,585	55.61%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	28,834,121,000	16,411,262,649	56.92%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	54,934,929,000	33,819,880,934	61.56%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	29,551,924,000	16,351,491,310	55.33%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	32,565,745,000	16,175,338,665	49.67%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	40,514,747,000	26,376,277,296	65.10%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	33,164,817,000	20,658,654,893	62.29%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	36,271,069,000	19,300,954,165	53.21%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	37,141,964,000	21,629,690,981	58.24%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29,139,750,000	19,315,812,684	66.29%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	30,963,182,000	23,894,094,981	77.17%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26,779,839,000	15,166,360,173	56.63%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	21,222,792,000	12,070,343,962	56.87%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	18,487,488,000	11,188,649,615	60.52%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	29,619,008,000	12,429,211,266	41.96%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	28,630,455,000	12,503,206,170	43.67%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	16,725,064,000	5,671,937,160	33.91%
TOTAL SATKER DAERAH		1,224,112,380,000	745,630,407,666	60.91%
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		1,987,526,974,000	1,226,498,485,411	61.71%





BADAN POM

KINERJA **BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2019



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI